

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan pada hakekatnya adalah proses perubahan terus menerus, yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju ke arah tujuan yang ingin dicapai. Penelitian mengenai pembangunan ekonomi mulai digalakkan oleh negara berkembang maupun negara sedang berkembang. Studi tentang pembangunan ekonomi telah menarik perhatian ekonom sejak jaman kaum Merkantilis, kaum klasik, sampai Mark dan Keynes.<sup>1</sup> Ekonom Klasik, Adam Smith telah menyinggung berbagai aspek tentang pembangunan ekonomi dalam bukunya "*An Inquiry Into The Nature and Causes of the Wealth of Nation*" atau lebih dikenal dengan sebutan *The Wealth Nation* (1776).

Pembangunan ekonomi perlu dipandang sebagai kenaikan dalam pendapatan per kapita, karena kenaikan itu merupakan penerimaan dan timbulnya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat, jadi pembangunan ekonomi dipandang sebagai suatu proses saling keterkaitan dan saling mempengaruhi antara faktor-faktor yang menghasilkan pembangunan ekonomi, yang dapat dilihat dan dianalisis. Dengan cara tersebut bisa diketahui deretan peristiwa yang timbul dan akan mewujudkan peningkatan kegiatan

---

<sup>1</sup> Drs. Lincoln Arsyad, M.Sc., Pengantar Perencanaan Ekonomi. MW Mandala, Yogyakarta 1993, hal. 1.

ekonomi dan taraf kesejahteraan masyarakat dari satu tahap pembangunan ke tahap pembangunan berikutnya.

Dalam GBHN dinyatakan bahwa titik berat pembangunan jangka panjang adalah pembangunan bidang ekonomi dengan sasaran utama untuk mencapai keseimbangan antara bidang pertanian dan bidang industri, serta terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat, yang berarti bahwa sebagian besar dari usaha pembangunan diarahkan pada pembangunan ekonomi. Dalam upaya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya diseluruh tanah air, pembangunan daerah memegang peranan penting.

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah, dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menuju masyarakat madani. Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai sub.sistem pemerintah negara, dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonomi, daerah mempunyai wewenang dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Kunci pembangunan daerah dalam mencapai sasaran pembangunan nasional secara efisien dan efektif adalah perencanaan, koordinasi dan keterpaduan antar sektor. Tujuan pembangunan dan kebijakan pembangunan

daerah adalah untuk menyetarakan pertumbuhan, tingkat kemajuan antar daerah dan mengurangi kesenjangan antar daerah. Untuk merencanakan pembangunan disuatu daerah, para perencana harus mengetahui ada tidaknya kesenjangan antar daerah serta potensi yang ada didaerah bersangkutan, potensi ini didapat melalui kemampuan daerah tersebut berproduksi. Seluruh barang dan jasa yang diproduksi di wilayah domestik tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari wilayah tersebut, merupakan produk domestik regional yang bersangkutan. Indikator ini disebut sebagai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Secara makro kenaikan PDRB dari tahun ke tahun merupakan salah satu indikator dari keberhasilan pembangunan daerah, dalam hal ini PDRB dikategorikan dalam berbagai sektor ekonomi, yaitu:

1. Sektor Pertanian
2. Sektor Pertambangan dan Penggalian.
3. Sektor Industri Pengolahan
4. Sektor Listrik, Gas dan Air bersih
5. Sektor Pembangunan
6. Sektor Perdagangan,Hotel dan Restoran.
7. Sektor Angkutan dan Komunikasi.
8. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
9. Sektor Jasa-jasa.

Pertumbuhan PDRB tidak lepas dari peran setiap sektor-sektor ekonomi tersebut diatas. Besar kecilnya kontribusi pendapatan setiap sektor ekonomi

merupakan hasil dari perencanaan serta pembangunan sektoral yang dilaksanakan di daerah. Dalam kaitannya dengan terbentuknya PDRB di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Kabupaten atau kota DIY, merupakan faktor yang menentukan tinggi rendahnya PDRB di DIY, dapat diperkirakan bahwa pemerataan perolehannya juga berbeda.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan propinsi dengan potensi daerah yang cukup besar untuk dikembangkan. Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bersama-sama dengan propinsi lain giat melakukan pembangunan di segala sektor ekonomi. Pembangunan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan secara adil dan merata.

Tabel 1.1.  
 Produk Domestik Regional Bruto  
 Daerah Istimewa Yogyakarta Atas Dasar Harga Konstan 1993  
 Tahun 1993-2002  
 (Juta Rupiah)

TAHUN	PDRB
1993	4.058.028
1994	4.387.074
1995	4.737.111
1996	5.106.349
1997	5.286.367
1998	4.685.777
1999	4.824.445
2000	5.017.709
2001	5.182.544
2002	5.357.669

Sumber: PDRB DIY, BPS, berbagai edisi

Pada tabel 1.1 menunjukkan perkembangan PDRB Daerah Istimewa Yogyakarta, dari tahun 1993 sampai dengan tahun 2002. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa PDRB Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami

peningkatan, penurunan dan kembali mengalami peningkatan. Tahun 1997 PDRB DIY sebesar 5.286.367 juta rupiah kemudian pada tahun 1998 PDRB turun menjadi 4.685.777 juta rupiah, turunnya angka ini karena pada pertengahan tahun 1997, perekonomian mengalami krisis ekonomi yang disebabkan oleh melemahnya nilai tukar rupiah terhadap US dollar, sehingga kegiatan perekonomian di Indonesia tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Dampak krisis moneter ini mulai terekam tahun 1998, dimana laju pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta turun tajam sebesar -11.18 persen. Oleh karena itu tahun 1998 digunakan sebagai *cut off point* perekonomian sebelum krisis dan sesudah krisis. Dan dalam kurun waktu 1998 sampai 2002, perekonomian semakin membaik. Pada periode tersebut pertumbuhan ekonomi rata-rata tiap tahun mencapai 2.91 persen.

Tabel 1.2  
Laju Pertumbuhan Ekonomi, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 1998-2002 (%)

Lapangan Usaha	Rata-rata		1998	1999	2000	2001	2002
	1993-1997	1998-2002					
1. Pertanian	4.02	- 0.66	-5.38	-5.50	10.22	-1.60	-5.75
2. Penggalian	4.84	0.32	-15.79	0.37	0.13	0.60	0.17
3. Industri Pengolahan	8.41	1.71	-6.01	3.43	-2.69	2.01	4.08
4. Listrik, Air minum	11.68	6.65	0.18	12.46	7.88	2.30	3.95
5. Bangunan	6.99	5.25	-32.83	3.21	4.59	2.87	10.35
6. Perdagangan, Hotel	7.38	3.85	-10.35	2.48	4.02	6.95	1.95
7. Angkutan, Komunikasi	6.17	6.95	-8.79	2.13	10.27	10.39	5.02
8. Perbankan, Jasa Perusahaan	8.14	3.52	-7.05	0.67	-1.22	3.61	11.03
9. Jasa-jasa	7.58	2.68	-12.47	2.32	2.67	1.54	4.21
Propinsi	6.81	2.91	-11.18	0.99	4.01	3.29	3.38

Sumber: PDRB Daerah Istimewa Yogyakarta, BPS, 1998-2002

Dari Tabel 1.2 terlihat pertumbuhan ekonomi pasca krisis masih jauh dari pencapaian laju pertumbuhan ekonomi yang pernah tercapai sebelumnya. Laju Pertumbuhan Ekonomi sebelum krisis mampu berada pada tingkat 6.81 persen pertahun, sementara pasca krisis hanya mampu 2.91 persen pertahun.

Tabel 1.3  
Produk Domestik Regional Bruto, Daerah Istimewa Yogyakarta  
Menurut Lapangan Usaha, Atas Dasar Harga Konstan 1993  
Tahun 1993-2002  
(jutaan rupiah)

NO	Lapangan Usaha	1993	1994	1995	1996	1997
1.	Pertanian	165.378	171.039	178.850	186.061	193.441
2.	Pertambangan/Penggalian	9.919	10.621	111.65	11.529	11.915
3.	Industri Pengolahan	83.134	98.086	102.909	116.489	121.759
4.	Listrik, Gas & Air Minum	2.607	4.174	4.559	2.624	2.952
5.	Bangunan	79.829	85.343	94.053	100.775	103.113
6.	Perdagangan, Restoran & Hotel	107.617	118.329	127.033	135.383	137.220
7.	Pengangkutan & Komunikasi	71.801	73.825	77.660	81.609	85.696
8.	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	41.073	43.708	49.137	54.514	56.573
9.	Jasa-jasa	140.310	152.405	167.007	173.723	179.790

NO	Lapangan Usaha	1998	1999	2000	2001	2002
1.	Pertanian	182.259	177.141	183.528	189.761	193.101
2.	Pertambangan/Penggalian	9.423	9.847	10.086	11.186	11.768
3.	Industri Pengolahan	116.072	122.463	129.639	130.669	135.585
4.	Listrik, Gas & Air Minum	4.483	3.955	3.991	4.555	4.899
5.	Bangunan	81.191	83.622	85.993	87.776	89.699
6.	Perdagangan, Restoran & Hotel	130.739	134.622	139.564	147.331	155.837
7.	Pengangkutan & Komunikasi	68.846	69.602	69.996	71.152	73.018
8.	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	54.170	55.272	52.551	55.306	60.750
9.	Jasa-jasa	161.828	164.254	170.370	174.234	179.306

Sumber : PDRB Daerah Istimewa Yogyakarta, menurut Lapangan Usaha, berbagai edisi

Dari Tabel 1.3 PDRB Daerah Istimewa Yogyakarta, pasca krisis, mulai mengalami kemajuan, pada tahun 1999 jumlah Produk Domestik Regional Daerah Istimewa Yogyakarta meningkat sebesar 4.824.445 juta rupiah, pada

tahun 2000 meningkat sebesar 5.017.709 juta rupiah, kemudian pada tahun 2001 meningkat lagi sebesar 5.182.554 juta rupiah, dan pada tahun 2002 mengalami peningkatan sebesar 5.357.669 juta rupiah. Selama kurun waktu 1993 sampai 2002 peranan kegiatan ekonomi diposisikan oleh sektor Pertanian, Industri, Perdagangan, Restoran dan Hotel serta Jasa-jasa. Sejak tahun 1998 sektor pertanian mampu tumbuh positif hingga tahun 2000, selanjutnya mengalami penurunan hingga tahun 2002. Sektor pertanian yang peranannya cukup dominan bagi perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tahun 2000, sebesar 901.380 juta rupiah, kemudian tahun 2001 mengalami penurunan sebesar 886.990 juta rupiah dan pada tahun 2002 kembali mengalami penurunan sebesar 835.988 juta rupiah, penurunan ini disebabkan antara lain; berkurangnya luas tanah pertanian karena beralih fungsi, kecepatan harga pertanian yang kalah dibandingkan kecepatan kenaikan nilai tambah sektor lain khususnya sektor industri dan perdagangan.

Nilai sektor industri pada tahun 2001 sebesar 677.486 juta rupiah, dan pada tahun 2002 mengalami peningkatan sebesar 705.157 juta rupiah, hal ini menunjukkan bahwa aktivitas Industri pengolahan non migas di Daerah Istimewa Yogyakarta mulai membaik. Pada tahun 2002 kontribusi sektor industri meningkat sebesar 0.09% dibanding tahun sebelumnya yang mampu mencapai 13.16% dan 13.07% pada tahun 2001. Sehingga dapat dikatakan bahwa sektor ini dapat terus dikembangkan, sehingga mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak seiring dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia.

Untuk sektor pertambangan/penggalian pada tahun 2001 senilai 60.917 juta rupiah dan pada tahun 2002 meningkat senilai 61.018 juta rupiah. Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat ditemukan pasir besi, batu kapur, batu apung, batu krikil, aluminium oksida, dan kalsium. Demikian pula dengan endapan dari abu vulkanik, kaolin dan bentonit yang banyak diekspor ke wilayah lain sebagai bahan dasar besi baja dan semen. Sementara nilai sektor listrik, Gas dan air minum pada tahun 2002 sebesar 40.547 juta rupiah, setelah sebelumnya senilai 39.004 juta rupiah pada tahun 2001. Sektor bangunan di Propinsi DIY mengalami peningkatan, pada tahun 2002 senilai 455.046 juta rupiah, sebelumnya senilai 412.355 juta rupiah pada tahun 2001, hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya kegiatan pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan pertokoan, perumahan, perluasan kampus perguruan tinggi, dan dibukanya jalur lalu lintas, ring road selatan.

Sektor pengangkutan dan komunikasi pada tahun 2002 senilai 706.728 juta rupiah, meningkat dari tahun sebelumnya senilai 672.922 juta rupiah. Sektor angkutan di Propinsi DIY terdiri dari angkutan darat, kereta api dan angkutan udara, termasuk jasa penunjang angkutan seperti usaha perparkiran. Sektor komunikasi merupakan sektor padat modal dan persyaratan mutu SDM yang berkualitas, sektor ini sebagian dikelola pemerintah dalam hal ini PT. Telkom untuk telekomunikasi, dan sebagian dikelola pihak swasta seperti PT. Indosat untuk hubungan Internasional.

Sektor Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan tahun 2002 senilai 603.398 juta rupiah, setelah sebelumnya senilai 543.471 juta rupiah pada



tahun 2001. Jumlah Bank dan kantor Bank terbanyak di kota Yogyakarta, demikian pula untuk jasa penunjang keuangan, serta lembaga keuangan non Bank seperti usaha asuransi, leasing, broker, dll, perkembangan cukup cepat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembangunan usaha sewa bangunan kebanyakan mengikuti permintaan sewa kamar kost bagi mahasiswa, usaha ini cocok untuk wilayah dimana berdiri pusat pendidikan atau perguruan tinggi.

Dalam tahun 2002 kontribusi sektor utama diposisikan oleh sektor Jasa. Sektor ini memiliki andil cukup besar dalam PDRB senilai 1.086.665 juta rupiah. Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai kota budaya dan tempat tujuan wisata, sektor jasa tampak unggul, tepatnya jasa swasta maupun perorangan. Kemudian sektor Perdagangan, Restoran dan Hotel menempati posisi kedua, pada tahun 2002 senilai 1.086.665 juta rupiah. Sesuai dengan potensi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah wisata, sektor perdagangan, restoran dan hotel selama tiga tahun terakhir, sebagai salah satu sektor, penyumbang terbesar dalam perekonomian Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, disamping sektor jasa-jasa dan sektor pertanian.

Dengan demikian besar kecilnya tingkat pertumbuhan ekonomi akan bergantung kemampuan sektor-sektor utama ini dalam mengangkat perekonomian secara keseluruhan, apabila suatu sektor yang dominan mengalami kemunduran pertumbuhan, maka akan berakibat serius juga bagi pertumbuhan keseluruhan.

Masalah utama didalam pelaksanaan pembangunan di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah kurang mampunya pemerintah daerah dalam

melaksanakan strategi perencanaan yang matang serta kurang jeli nya pemerintah daerah dalam melihat pergeseran-pergeseran yang terjadi dari tahun ke tahun dalam sektor ekonomi. Disinilah peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah cukup dominan dalam menentukan arah serta rencana pembangunan di daerah, agar dapat berjalan sesuai dengan prioritas yang diinginkan.

Kebijakan pemerataan dalam pembangunan daerah haruslah dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat di daerah, melalui pembangunan yang serasi dan terpadu antar sektor pembangunan daerah, yang efektif dan efisien menuju tercapainya kemandirian daerah dan kemajuan yang merata di seluruh Indonesia.

Secara makro ekonomi, untuk mempermudah dalam menganalisis pendapatan regional, perekonomian dikelompokkan menjadi tiga sektor kegiatan produksi, yaitu sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier. Pengelompokkan ini berdasarkan input maupun output dari asal terjadinya proses produksi antar masing-masing produsen.

Disebut **sektor primer** apabila outputnya masih merupakan proses tingkat dasar dan sangat bergantung pada sumber daya alam yaitu sektor pertanian dan penggalian. Untuk sektor ekonomi yang inputnya berasal dari sektor primer dikelompokkan dalam **sektor sekunder**. Yang dicakup dalam sektor sekunder adalah sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih dan sektor bangunan. Sedangkan sektor lainnya yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor

keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa dikelompokkan ke dalam **sektor tersier**.

Sehubungan dengan permasalahan diatas maka Daerah Kabupaten Bantul sebagai bagian dari daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan daerah yang besar potensinya untuk dikembangkan. Kabupaten Bantul bersama-sama dengan daerah lain terus giat melakukan pembangunan disegala sektor ekonomi. Pembangunan di daerah Kabupaten Bantul merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan di daerahnya sendiri dan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, secara adil dan merata menuju tercapainya tujuan nasional yang bersifat menyeluruh, terarah, terpadu dan berkesinambungan.

Kabupaten Bantul terletak dibagian Utara Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk menggambarkan kemakmuran masyarakat di daerah, dapat dilakukan dengan melihat kemampuan produksinya. Indikator yang digunakan adalah dengan melihat Produk Domestik Regional Bruto.

Dengan memperhatikan perubahan yang terjadi pada PDRB Daerah Kabupaten Bantul dapat diketahui perkembangan kemakmuran daerah tersebut. Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantul, dapat dilihat melalui pertumbuhan masing-masing sektornya.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Produk Domestik Regional Bruto, Kabupaten DATI II Bantul, Tahun 2001

Tabel 1.4  
 Produk Domestik Regional Bruto  
 Kabupaten Bantul  
 Atas Dasar Harga Konstan 1993  
 Tahun 1993 - 2002  
 (jutaan rupiah)

NO	TAHUN	PDRB
1	1993	701.668
2	1994	757.530
3	1995	812.373
4	1996	865.707
5	1997	892.459
6	1998	809.011
7	1999	820.611
8	2000	845.718
9	2001	871.970
10	2002	903.932

Sumber: PDRB Kabupaten DATI II, Bantul, 1993-2002

Tabel 1.5  
 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bantul  
 Tahun 1998-2002 (persen)

NO	SEKTOR	1998	1999	2000	2001	2002
1	Pertanian	- 4.97	- 3.64	3.61	3.40	2.18
2	Pertambangan/Penggalian	- 20.91	4.50	2.43	10.91	5.20
3	Industri Pengolahan	- 4.67	5.51	5.86	0.79	2.69
4	Listrik, Gas & Air Minum	29.84	3.18	0.91	14.13	7.24
5	Bangunan	- 21.26	2.79	3.04	2.07	3.37
6	Perdagangan, Restoran & Hotel	- 4.72	2.97	3.67	5.57	5.09
7	Pengangkutan & Komunikasi	- 19.66	1.10	0.57	1.65	2.62
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	- 4.25	2.03	- 4.92	5.24	3.71
9	Jasa-jasa	- 9.99	1.50	3.72	2.27	3.31
	<b>PDRB</b>	- 9.25	1.32	3.06	3.10	3.30

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto, BPS, 1998-2002

Pada tabel 1.4 menunjukkan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bantul, dari tahun 1993 hingga tahun 2002. Dari tahun 1993 sampai dengan tahun 1997, PDRB Kabupaten Bantul terus mengalami peningkatan. Pada tahun 1998 terjadi penurunan PDRB sebesar 809.011 juta rupiah sebagai akibat terjadinya krisis ekonomi yang melanda wilayah Indonesia, pada

pertengahan tahun 1997, yang berimplikasi kepada wilayah-wilayah yang lebih kecil, tidak terkecuali di Kabupaten Bantul. Akan tetapi tahun-tahun berikutnya kondisi perekonomian mulai membaik, PDRB Kabupaten Bantul mulai kembali mengalami peningkatan dari tahun 1999 sampai tahun 2002. PDRB tahun 1999 senilai 820.611 juta rupiah, tahun 2000 meningkat menjadi 845.718 juta rupiah, tahun 2001 meningkat lagi sebesar 871.970 juta rupiah, dan tahun 2002 kembali meningkat sebesar 903.932 juta rupiah. Nilai yang paling tajam mempengaruhi PDRB Kabupaten Bantul berasal dari sektor pertanian, sektor jasa-jasa dan sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Laju pertumbuhan PDRB merupakan salah satu indikator makro untuk melihat perkembangan perekonomian suatu daerah. Perkembangan dan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi suatu daerah membawa dampak terhadap perubahan struktur perekonomian daerah tersebut.

Sejak tahun 1999 kondisi perekonomian Kabupaten Bantul dapat dikatakan menuju ke arah perbaikan, walaupun dengan pertumbuhan di bawah 5 %. Pada periode 1999 – 2002, rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantul sebesar 3.15 % per tahun.

Tabel 1.5 menunjukkan gejala ke arah pemulihan ekonomi pada tahun 2001. Hal ini ditandai dengan laju pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan angka positif 3.10 persen. Kemudian pada tahun 2002, kembali tumbuh positif dengan angka pertumbuhan mencapai 3.30 persen.

Pada tahun 2002, pertumbuhan ekonomi secara sektoral menunjukkan bahwa semua sektor ekonomi mengalami pertumbuhan positif. Sektor ekonomi

yang pertumbuhannya tertinggi dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya adalah sektor listrik, gas dan air bersih, dengan laju pertumbuhan mencapai 7.24 persen. Tingginya pertumbuhan sektor ini disebabkan adanya penambahan jumlah pelanggan listrik dan peningkatan kapasitas produksi dari perusahaan daerah air minum (PDAM).

Sektor ekonomi lain yang juga mengalami pertumbuhan cukup tinggi adalah sektor pertambangan dan penggalian dengan pertumbuhan mencapai 5.20 persen, sedangkan Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran mencapai pertumbuhan 5.09 persen. Sementara untuk sektor pertanian, sektor Industri pengolahan, sektor bangunan, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan, & jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa mencapai pertumbuhan dibawah 4 persen

Struktur perekonomian suatu daerah sangat ditentukan oleh besarnya peranan sektor-sektor ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Struktur perekonomian yang terbentuk dari nilai tambah yang dapat diciptakan oleh masing-masing sektor dapat menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap sektor ekonomi.

**Tabel 1.6**  
**Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bantul**  
**Menurut Sektor, Atas Dasar Harga Konstan 1993**  
**(jutaan rupiah)**

NO	SEKTOR	1993	1994	1995	1996	1997
1	Pertanian	165.378	171.039	178.850	186.061	193.441
2	Pertambangan/Penggalian	9.919	10.621	11.165	11.529	11.915
3	Industri Pengolahan	83.134	98.086	102.909	116.489	121.759
4	Listrik, Gas & Air minum	2.607	4.174	4.559	2.624	2.952
5	Bangunan	79.829	85.343	94.053	100.775	103.113
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	107.617	118.329	127.033	135.383	137.220
7	Pengangkutan & Komunikasi	71.801	73.825	77.660	81.609	85.696
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Peusahaan	41.073	43.708	49.137	54.514	56.573
9	Jasa-jasa	140.310	152.405	167.007	173.723	179.790

NO	SEKTOR	1998	1999	2000	2001	2002
1	Pertanian	182.259	177.141	183.528	189.761	193.101
2	Pertambangan/Penggalian	9.423	9.847	10.086	11.186	11.768
3	Industri Pengolahan	116.072	122.463	129.639	130.669	135.585
4	Listrik, Gas & Air minum	4.483	3.955	3.991	4.555	4.899
5	Bangunan	81.191	83.622	85.993	87.776	89.699
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	130.739	134.622	139.564	147.331	155.837
7	Pengangkutan & Komunikasi	68.846	69.602	69.996	71.152	73.018
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Peusahaan	54.170	55.272	52.551	55.306	60.750
9	Jasa-jasa	161.828	164.254	170.370	174.234	179.306

*Sumber : Produk Domestik Regional Bruto, BPS Kabupaten Bantul, berbagai edisi*

Pada Tabel 1.6 di atas gambaran PDRB Kabupaten Bantul dari tahun 2001 sampai dengan 2002, memperlihatkan adanya kemajuan yang cukup berarti dimana nilai dari PDRB Kabupaten Bantul pada tahun 2001 untuk sektor pertanian sebesar 189.761 juta rupiah dan mengalami peningkatan pada tahun 2002 sebesar 193.101 juta rupiah. Sektor ini, terbesar dalam memberikan sumbangan terhadap PDRB. Besarnya peranan sektor pertanian ini terutama didominasi oleh sub sektor tanaman bahan pangan, hal ini dimungkinkan oleh luas lahan pertanian di Kabupaten Bantul kurang lebihnya adalah lahan

pertanian, sehingga sebagian masyarakat Bantul masih menggantungkan kehidupan pada sektor ini. Sektor yang peranannya cukup besar terhadap PDRB setelah sektor pertanian, adalah sektor jasa-jasa. Sektor ini mengalami peningkatan cukup stabil, pada tahun 2001 nilai sektor jasa mencapai 174.234 juta rupiah, dan meningkat pada tahun 2002 senilai 179.306 juta rupiah. Sektor selanjutnya yang ikut mendukung meningkatnya PDRB, setelah sektor pertanian dan sektor jasa, adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran. Nilai sektor ini pada tahun 2001 sebesar 147.331 juta rupiah, meningkat pada tahun 2002 senilai 155.837 juta rupiah.

Sektor unggulan di Kabupaten Bantul adalah, sektor pertanian, sektor jasa-jasa serta sektor perdagangan, hotel dan restoran. Dengan demikian besar dan kecilnya tingkat pertumbuhan PDRB akan bergantung kemampuan sektor unggulan ini, dalam mengangkat perekonomian secara keseluruhan. Atau dengan kata lain tergantung berapa besarnya pertumbuhan sektor unggulan ini. Apabila suatu sektor yang dominan mengalami kemunduran pertumbuhan, maka akan berakibat serius bagi pertumbuhan secara keseluruhan.

Tujuan akhir dari pemantauan pergeseran dalam Struktur Perekonomian Daerah adalah naiknya pertumbuhan ekonomi melalui Indikator Produk Domestik Regional Bruto, yang berarti pula menaikkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang pergeseran-pergeseran ekonomi dalam struktur ekonomi di Kabupaten Bantul dan sektor-



sektor potensial dalam perekonomian Kabupaten Bantul selama kurun waktu 1993-2002.

### **1.2 Perumusan Masalah**

Dari Latar belakang masalah yang telah diuraikan maka yang menjadi pokok permasalahannya adalah:

1. Bagaimana laju pertumbuhan sektor ekonomi Kabupaten Bantul selama kurun waktu 1993-2002.
2. Bagaimana laju pertumbuhan sektor-sektor ekonomi Kabupaten Bantul tahun 1993-2002 dibandingkan dengan sektor perekonomian Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan analisis Shift-Share (S-S)
3. Sektor-sektor mana yang merupakan sektor potensial (sektor basis) yang merupakan sektor andalan dalam struktur perekonomian Kabupaten Bantul tahun 1993-2002 berdasarkan analisis Location Quotient (LQ).

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pergeseran pangsa setiap sektor ekonomi dengan menggunakan analisis Shift-Share (S-S).
2. Untuk mengetahui komponen-komponen yang berpengaruh pada perekonomian di Kabupaten Bantul.
3. Untuk mengetahui sektor mana yang merupakan sektor potensial (Basis) di Kabupaten Bantul dengan menggunakan analisis Location Quotient (LQ)

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

- a. Bagi Penulis, hasil penelitian ini merupakan aplikasi langsung dari salah satu alat analisa ekonomi yang di dapat di bangku kuliah dan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- b. Membantu memberikan informasi bagi peneliti lain yang akan mengembangkan penelitian yang pernah dilakukan.
- c. Memberikan masukan bagi lembaga yang terkait dengan masalah ini yaitu Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul.

#### **1.5 Hipotesis**

Sebagai jawaban atas dugaan sementara atas masalah yang diteliti maka diajukan beberapa hipotesis yaitu sebagai berikut :

1. Pangsa (Share) sektor primer (sektor pertanian) masih mendominasi kontribusi dalam PDRB Kabupaten Bantul, meskipun dengan tingkat pertumbuhan pendapatan dari sektor tersebut cenderung menurun kontribusinya.
2. Perkembangan Pangsa (Share) sektor sekunder (sektor industri pengolahan, sektor listrik) cenderung meningkat dan mempunyai potensi yang dapat diandalkan untuk memberikan kontribusi yang berarti bagi daerah dan dapat memberikan perubahan struktur perekonomian dimasa yang akan datang.

3. Sektor potensial (sektor basis) masih di dominasi sektor pertanian dan sektor industri pengolahan, meskipun kontribusi terhadap PDRB cenderung mengalami penurunan.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1. Jenis Data dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data-data yang berasal dari laporan penelitian dan instansi tertentu yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

- PDRB Kabupaten Bantul menurut sektor tahun 1993-2002, Atas Dasar Harga Konstan tahun 1993.
- PDRB Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, menurut sektor tahun 1993-2002 Atas Dasar Harga Konstan tahun 1993.

Data dalam penelitian ini bersumber dari: Kantor Statistik Kabupaten Bantul, BPS Pusat Daerah Istimewa Yogyakarta dan Perpustakaan Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **1.6.2. Definisi Variabel**

1. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bantul adalah seluruh produk barang dan jasa yang diproduksi di wilayah Kabupaten Bantul tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari wilayah tersebut.
2. Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah seluruh produk barang dan jasa yang diproduksi di wilayah propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tanpa

memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari wilayah tersebut.

### **1.6.3. Metode Analisis**

Dalam penelitian ini digunakan dua metode analisis yaitu :

1. Metode analisis kualitatif, yaitu suatu metode yang tidak menggunakan rumus, tetapi sifatnya berupa penjelasan dan keterangan-keterangan pelengkap.
2. Metode analisis kuantitatif, yaitu suatu metode yang menggunakan rumus-rumus tertentu yang sesuai dengan topik permasalahan yang diteliti.

Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis perencanaan pembangunan, yaitu analisis Shift-Share (S-S) dan Location Quotient (LQ).

#### **1.6.3.1. Teknik Analisis Shift-Share**

Teknik analisis Shift-Share (S-S) adalah suatu teknik analisis dalam perencanaan pembangunan yang menganalisis bagaimana pangsa masing-masing sektor dalam perekonomian daerah tumbuh dari tahun ke tahun terhadap perekonomian propinsi, dengan cara membandingkan laju pertumbuhan sektor-sektor perekonomian propinsi. Dengan melihat perbandingan laju pertumbuhan sektor ekonomi daerah dan propinsi akan dapat dilihat adanya pertumbuhan dan pergeseran (shift) sektor-sektor perekonomian daerah sekaligus melihat bila daerah tersebut mengalami pertumbuhan dan kemajuan sesuai dengan kedudukannya dalam perekonomian propinsi. Teknik ini membagi pertumbuhan sebagai perubahan ( $D$ ) suatu

variabel wilayah yaitu pendapatan (PDRB) sektor-sektor ekonomi daerah selama kurun waktu tertentu terhadap pengaruh-pengaruh: Pertumbuhan Regional (N), pengaruh pertumbuhan regional disebut pengaruh pangsa (Share) memuat perubahan suatu variabel wilayah yaitu pendapatan (PDRB) sektor-sektor ekonomi wilayah propinsi, selama kurun waktu tertentu, Bauran Industri (M) pengaruh bauran industri disebut bauran komposisi (proportional shift), yang mengukur sejauh mana pertumbuhan pada suatu sektor di suatu daerah berbeda dengan pertumbuhan sektor yang sama ditingkat propinsi, Keunggulan Kompetitif (C), pengaruh keunggulan kompetitif (regional share) teknik ini membandingkan laju pertumbuhan sektor-sektor disuatu daerah dengan laju pertumbuhan sektor secara propinsi, dan mengamati penyimpangan-penyimpangan dari perbandingan tersebut, jika penyimpangan tersebut positif, maka hal ini yang disebut dengan keunggulan kompetitif dari suatu sektor dalam wilayah tersebut.

Adapun bentuk umum persamaan dari analisis ini dan komposisi-komposisinya adalah sebagai berikut:

$$D_{ij} = N_{ij} + M_{ij} + C_{ij}$$

Keterangan:

i = Sektor-sektor ekonomi yang diteliti

j = wilayah yang diteliti

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah pendatan atau nilai sektor yang dikonotasikan sebagai (Y).

$$D_{ij} = Y^{*ij} - Y_{ij}$$

$$N_{ij} = Y_{ij} \cdot r_n$$

$$M_{ij} = Y_{ij} (r_{in} - r_n)$$

$$C_{ij} = Y_{ij} (r_{ij} - r_{in})$$

$r_{ij}$ ,  $r_{in}$  dan  $r_n$  mewakili laju pertumbuhan Kabupaten, propinsi dan pertumbuhan secara nasional, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut :

$$r_{ij} = \frac{(Y^{*ij} - Y_{ij})}{Y_{ij}}$$

$$r_{in} = \frac{(Y^{*in} - Y_{in})}{Y_{in}}$$

$$r_n = \frac{(Y^{*n} - Y_n)}{Y_n}$$

Secara keseluruhan wilayah, persamaan untuk  $i$  dan  $j$  adalah

$$D_{ij} = Y_{ij} \cdot r_n + Y_{ij} (r_{in} - r_n) + Y_{ij} (r_{ij} - r_{in}) \quad \text{atau}$$

$$D_{ij} = N_{ij} + M_{ij} + C_{ij}$$

Keterangan:

- Dij = Komponen Pertumbuhan secara keseluruhan
- Nij = Komponen pertumbuhan regional (pertumbuhan sektor i di wilayah j)
- Mij = Komponen Bauran Industri (sektor i di wilayah j)
- Cij = Komponen Keunggulan Kompetitif (sektor i di wilayah j)
- Rij = Laju pertumbuhan sektor i di wilayah Kabupaten Bantul
- Rin = Laju pertumbuhan sektor i di Propinsi DIY
- Rn = Laju pertumbuhan Nasional
- Yij = Pendapatan sektor i di Kabupaten Bantul tahun 1993
- Y\*ij = Pendapatan sektor i di Kabupaten Bantul tahun 2002
- Yin = Pendapatan setor i di Propinsi DIY tahun 1993
- Y\*in = Pendapatan sektor i di Propinsi DIY tahun 2002
- Y\*n = Pendapatan total Propinsi DIY tahun 2002
- Yn = Pendapatan total Propinsi DIY tahun 1993

Untuk pendekatan Shift-Share, Nij merupakan perubahan sektor i di wilayah j, apabila di wilayah j mengalami pertumbuhan yang lebih rendah dari pertumbuhan propinsi maka wilayah tersebut mengalami *shift loss* (kerugian) sektor i di wilayah j. Nij ini selanjutnya disebut sebagai pengaruh pangsa (share).

Mij merupakan pengaruh industri yang selanjutnya disebut propotional shift atau bauran komposisi, apabila Mij mempunyai tanda positif (+) berarti bahwa variabel yang dianalisis mempunyai tingkat pertumbuhan yang lebih besar dari pertumbuhan propinsi, demikian sebaliknya jika mempunyai tanda (-

) berarti pertumbuhan pendapatan sektor  $i$  di wilayah  $j$  adalah sama dengan pertumbuhan total propinsi.

$C_{ij}$  merupakan keunggulan kompetitif sektor  $i$  di wilayah  $j$  atau disebut regional share. Apabila bertanda positif (+) berarti sektor  $i$  mempunyai kecepatan untuk tumbuh dibandingkan dengan sektor sejenis ditingkat propinsi.

### 1.6.3.2. Analisis Location Quotient (LQ)

Teknik Location Quotient (LQ) digunakan untuk mengukur konsentrasi (basis) dari kegiatan atau sektor ekonomi dalam suatu wilayah dengan cara membandingkan peranannya dalam perekonomian daerah dibagi menjadi dua golongan yaitu:

1. Kegiatan ekonomi yang melayani pasar di daerah itu sendiri maupun pasar di luar daerah yang bersangkutan, kegiatan ekonomi seperti ini disebut kegiatan ekonomi basis (basic industry)
2. Kegiatan ekonomi yang hanya melayani pasar di daerah itu sendiri, dinamakan industri lokal (non basic industry)

Dasar pemikiran penggunaan teknik ini adalah teori economic base, yang intinya adalah karena sektor ekonomi basis itu menghasilkan barang dan jasa untuk pasar di daerah sendiri maupun diluar daerah yang bersangkutan, maka penjualan hasil keluar daerah tersebut menyebabkan kenaikan pendapatan dan menciptakan kesempatan kerja baru. Kenaikan pendapatan di daerah itu tidak hanya menaikkan permintaan terhadap sektor non basic atau industri lokal,



kenaikan permintaan ini mendorong investasi pada industri lokal, sebagai akibat dari kenaikan industri basis.

Berdasar pemikiran diatas, maka sektor ekonomi basislah yang patut dikembangkan disuatu daerah. Oleh karena itu hal pertama yang harus dilakukan adalah menggolongkan tiap kegiatan ekonomi suatu daerah apakah termasuk sektor basis atau sektor non basis (industri lokal), untuk keperluan ini dipakai analisis Location Quotient.

Adapun bentuk persamaan teknik analisis Location Quotient (LQ) adalah :

$$LQ = \frac{v_i / v_t}{V_i / V_t}$$

Keterangan :

LQ = Koefisien LQ

$v_i$  = PDRB sektor i di Kabupaten Bantul

$v_t$  = PDRB total sektor di Kabupaten Bantul

$V_i$  = PDRB sektor i di tingkat Propinsi DIY

$V_t$  = PDRB total sektor pada tingkat Propinsi DIY

Berdasar formulasi diatas maka apabila :

$LQ > 1$ , berarti bahwa daerah tersebut berspesialisasi pada sektor tersebut, diartikan sektor tersebut mampu men-supply outputnya (impor) ke wilayah lain.

$LQ = 1$ , berarti bahwa baik daerah maupun propinsi mempunyai spesialisasi yang sama derajatnya.

$LQ < 1$ , berarti bahwa daerah tidak berspesialisasi pada sektor tersebut, sehingga sektor tersebut memerlukan output (ekspor) dari daerah lain.

## **1.7 Sistematika Penulisan**

### **BAB I. Pendahuluan**

Bab I berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesa penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II. Gambaran Umum Daerah Penelitian**

Bab II mencakup tentang letak geografis, strategi pembangunan, keadaan penduduk, tujuan perekonomian serta tinjauan perekonomian Kabupaten Bantul dan lain-lain.

### **BAB III. Kajian Pustaka**

### **BAB IV. Landasan Teori**

Bab ini berisi teori dan konsep yang sesuai dan melandasi penelitian sehingga dapat mendukung penelitian yang dilakukan.

### **BAB V. Data dan Analisa Data**

Bab V merupakan, hasil analisis Shift-Share dan Location Quotient Kabupaten Bantul serta penjelasan-penjelasan dari hasil perhitungan yang telah dilakukan.

### **BAB VI. Kesimpulan dan Implikasi**

Bab IV merupakan kesimpulan yang didapat dari hasil perhitungan serta implikasi sesuai dengan permasalahan.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM DAERAH KABUPATEN BANTUL

#### 2.1. Letak Geografis

Pada bab II ini akan di deskripsikan kondisi umum wilayah Kabupaten Bantul dan kecamatan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terletak di Pulau Jawa Bagian Tengah. Secara Geografis terletak diantara 110° 18' 40" sampai 110° 34' 40" Bujur Timur dan antara 7° 44' 50" sampai 7° 44' 50" Lintang Selatan. Secara administratif, Kabupaten Bantul berbatasan dengan:

- Bagian Utara berbatasan dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman
- Bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul.
- Bagian Barat berbatasan dengan Kabupaten Kulonprogo
- Bagian Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia.

Tabel 2.1

Luas Kabupaten/Kotamadya

No	Kabupaten/Kotamadya	Ibukota	Luas (km <sup>2</sup> )
1.	Kodya Yogyakarta	Yogyakarta	32,50 km <sup>2</sup>
2.	<b>Kabupaten Bantul</b>	<b>Bantul</b>	<b>506,85 km<sup>2</sup></b>
3.	Kabupaten Sleman	Sleman	574,82 km <sup>2</sup>
4.	Kabupaten Gunung Kidul	Wonosari	1.486,35 km <sup>2</sup>
5.	Kabupaten Kulonprogo	Wates	586,28 km <sup>2</sup>

Sumber: Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka, BPS 2002

Kabupaten Bantul sebagai salah satu Kabupaten di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, secara administratif terbagi dalam tujuh belas kecamatan. Adapun luas wilayahnya yaitu 506,85 km<sup>2</sup> yang terdiri dari:

Tabel 2.2

## Luas Wilayah Kabupaten Bantul Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	% Luas
1.	Srandakan	18,340 Ha	3,62
2.	Sanden	23,270 Ha	4,59
3.	Kretek	25,500 Ha	5,03
4.	Pundong	23,760 Ha	4,69
5.	Bambanglipuro	22,820 Ha	4,50
6.	Pandak	24,290 Ha	4,79
7.	Bantul	21,990 Ha	4,34
8.	Jetis	25,600 Ha	5,05
9.	Imogiri	27,810 Ha	11,41
10.	Dlingo	56,340 Ha	11,12
11.	Pleret	21,280 Ha	4,20
12.	Piyungan	33,120 Ha	6,53
13.	Banguntapan	26,290 Ha	5,19
14.	Sewon	26,760 Ha	5,28
15.	Kasih	32,380 Ha	6,39
16.	Pajangan	33,190 Ha	6,55
17.	Sedayu	34,110 Ha	6,73

Sumber: BPS, Bantul Dalam Angka 2002

## 2.2. Kondisi Kependudukan

Jumlah penduduk yang besar merupakan potensi pembangunan yang besar. Akan tetapi harus disadari bahwa dengan jumlah penduduk yang besar, bukanlah jaminan bagi berhasilnya pembangunan. Peningkatan penduduk yang besar tanpa adanya peningkatan kesejahteraan justru dapat menjadi bencana, dapat menimbulkan gangguan terhadap program-program pembangunan, yang sedang dilaksanakan.

Perkembangan penduduk tanpa disertai dengan kontrol untuk mengatur jumlah penduduk yang diinginkan, akan menimbulkan prolema sosial ekonomi dengan segala akibatnya. Pertambahan penduduk yang besar dari tahun ke tahun memerlukan tambahan investasi dan sarana di bidang pendidikan,

kesehatan, perumahan dan lain sebagainya. Hal ini tentu saja menjadi masalah pemerintah dalam usahanya untuk membangun dan meningkatkan taraf hidup warga negaranya.

Jumlah penduduk Kabupaten Bantul pada akhir tahun 2002 adalah 789.745 jiwa yang tersebar di 75 desa di 17 kecamatan, dari jumlah tersebut 386.777 jiwa adalah laki-laki dan 402.968 jiwa adalah wanita.

Pertumbuhan penduduk tahun 2002 sebesar 0,85% sedikit meningkat dibanding tahun sebelumnya. Tahun 2001 sebesar 0,83% dengan jumlah penduduk sebesar 783,060 jiwa.

Dengan luas wilayah 506,85 km<sup>2</sup>, kepadatan penduduk Kabupaten Bantul tahun 2002 adalah 1.558 jiwa per km<sup>2</sup> dan dengan jumlah KK sebesar 196.212, maka rata-rata ada 4.02 jiwa dalam satu KK.

### **2.3. Kondisi Ketenagakerjaan**

Masalah angkatan kerja di Kabupaten Bantul berkaitan erat dengan penyediaan lapangan kerja. Pertumbuhan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan penyediaan lapangan kerja yang memadai, akan menimbulkan masalah-masalah sosial lain yang dapat mengganggu jalannya pembangunan di Kabupaten Bantul.

Jumlah pencari kerja yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul tahun 2002 tercatat sebanyak 11.085 orang, yang terdiri dari Sarjana sebanyak 2.439 orang, Sarjana muda sebanyak 837 orang, lulusan SLTA umum 2.022 orang, SLTA kejuruan sebanyak 4.690 orang, lulusan SLTP 892 orang dan lulusan SD sebanyak 205 orang.

Tabel 2.3  
 Penempatan Tenaga Kerja melalui mekanisme AKL, AKAD dan AKAN  
 Di Kabupaten Bantul Tahun 2002

Mekanisme Penempatan	Laki-laki	Wanita	Jumlah
AKL	161	224	405
AKAD	21	506	527
AKAN	241	428	669
Jumlah	423	1.178	1.601

*Sumber : BPS, Bantul Dalam Angka 2002*

Keterangan :

AKL = Antar Kerja Lokal, yaitu penempatan tenaga kerja se Kabupaten/Prop

AKAD = Antar Kerja Daerah, yaitu penempatan kerja ke propinsi lain.

AKAN = Antar Kerja Negara, yaitu penempatan tenaga kerja ke negara lain.

Dari tabel diatas, menunjukkan data penempatan pencari kerja di Kabupaten Bantul tahun 2002 berdasarkan jenis Antar Kerja Lokal, Daerah dan Negara, dimana jumlah laki-laki sebesar 423 orang, dan 1.178 orang adalah wanita. Dapat dikatakan bahwa jumlah kaum wanita lebih mendominasi dalam penempatan kerja dibanding kaum laki-laki.

Pertambahan angkatan kerja, selain disebabkan oleh bertambahnya jumlah penduduk yang memasuki usia angkatan kerja, juga disebabkan semakin banyaknya penduduk wanita yang menuntut lapangan kerja.

## 2.4. Kondisi Perekonomian Kabupaten Bantul

### 2.4.1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bantul

PDRB merupakan salah satu indikator umum yang dapat menggambarkan kegiatan ekonomi suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. PDRB mencakup seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari wilayah tersebut.

Nilai PDRB yang semakin tinggi dengan diikuti pertumbuhan ekonomi yang meningkat menunjukkan perekonomian daerah yang semakin membaik, yang menggambarkan bahwa produk barang dan jasa yang dihasilkan semakin meningkat. Sebaliknya peningkatan PDRB tanpa diikuti dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa perekonomian daerah dalam kondisi tidak baik.

Tabel 2.4  
Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan  
Kabupaten Bantul tahun 1999 – 2002

TAHUN	PDRB atas dasar harga konstan	LPE
1998	809.932	-9,25
1999	820.611	1,32
2000	845.718	3,06
2001	871.970	3,10
2002	903.932	3,67

Sumber : BPS, PDRB Kabupaten Bantul, 2000-2002

Secara umum keadaan ekonomi di Kabupaten Bantul dalam tiga tahun terakhir menunjukkan kinerja yang cukup baik, yang ditandai dengan laju pertumbuhan ekonomi berkisar antara tiga persen. Nilai PDRB atas dasar harga

konstan 2002 Kabupaten Bantul mencapai 903.932 juta rupiah, atau naik sebesar 3.67 persen, dibandingkan dengan PDRB tahun 2001, sebesar 871.970 juta rupiah. Selain itu PDRB per kapita tahun 2002 juga menunjukkan adanya peningkatan menjadi sekitar Rp 3,48 juta.

Pada tahun 2002 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantul mencapai 3,67 persen, pertumbuhan ini sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2001, yaitu sebesar 3,10 persen. Setelah mengalami kontraksi yang cukup dalam pada tahun 1998 sebesar -9,25 persen, perekonomian Kabupaten Bantul mulai membaik, ditandai dengan PDRB yang mulai tumbuh positif sebesar 1,32 persen pada tahun 1999, dan sekitar 3 persen pada tiga tahun terakhir.

#### **2.4.2. Struktur Perekonomian Kabupaten Bantul**

Prioritas pembangunan dapat ditentukan jika perhatian lebih dicurahkan pada sektor-sektor yang lebih dominan peranannya dalam menunjang ekonomi suatu daerah, dengan memperhatikan apakah sektor tersebut masih mungkin untuk dikembangkan. Apabila sektor-sektor ekonomi tersebut mengalami perubahan, maka akan berpengaruh pada sektor lain yang terkait dan selanjutnya berpengaruh pula terhadap pertumbuhan ekonomi secara total.

Sektor pertanian sampai dengan tahun 2002 masih memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Bantul, yaitu sebesar 21,36 persen. Besarnya peranan sektor pertanian ini, terutama didominasi oleh subsektor tanaman bahan makanan, yang terdiri dari produksi padi, palawija, sayuran dan buah-buahan. Tiga subsektor yang lain, yaitu



tanaman perkebunan, kehutanan dan perikanan, sharenya terhadap pembentukan PDRB relatif kecil, yaitu masing-masing kurang dari satu persen. Jika dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya, kontribusi sektor pertanian tahun 2002 ini cenderung mengalami penurunan, pada tahun 2000 kontribusi pertanian sebesar 21,70 persen dan tahun 2001 sebesar 21,76 persen. Dalam jangka panjang peranan sektor pertanian diprediksikan terus menurun sebagai akibat dari keterbatasan sumber daya alam dan dilain pihak sektor-sektor lainnya diperkirakan akan tumbuh lebih cepat. Namun demikian sektor pertanian harus tetap mendapat perhatian yang serius, mengingat sektor ini sebagai tumpuan hidup bagi sebagian besar penduduk Kabupaten Bantul.

Sektor pertambangan dan penggalian di Kabupaten Bantul pada tahun 2002 memberikan kontribusi sebesar 1,30 persen, sedikit lebih tinggi dari kontribusi tahun sebelumnya sebesar 1,28 persen pada tahun 2001. Seluruh jenis komoditi yang dicakup dalam sektor pertambangan dan penggalian dapat dikelompokkan kedalam tiga subsektor, yaitu pertambangan migas, pertambangan non migas dan penggalian, Dari ke tiga jenis diatas, hanya subsektor penggalian saja yang terdapat di Kabupaten Bantul, sub sektor penggalian mencakup penggalian dan pengambilan segala jenis barang galian seperti batu-batuan, pasir dan tanah yang pada umumnya berada diatas permukaan bumi. Di Kabupaten Bantul komoditi yang dihasilkan dari subsektor ini adalah berasal dari penggalian pasir sedimen di sepanjang sungai dan di daerah pesisir selatan.

Sektor industri pengolahan di Kabupaten Bantul pada tahun 2002 memberikan kontribusi sebesar 15 persen. Sektor industri pengolahan dibedakan menjadi dua subsektor yaitu subsektor industri migas dan non migas, untuk Kabupaten Bantul hanya terdapat industri tanpa migas yang dalam pengelolaannya dikelompokkan menjadi industri besar, sedang, industri kecil dan industri rumah tangga. Komoditi yang dihasilkan oleh sub sektor ini yang menjadi andalan Kabupaten Bantul adalah industri keramik, mebel dan industri makanan jadi. Sektor ini merupakan sektor keempat yang memberikan kontribusi terbesar bagi PDRB Kabupaten Bantul. Dalam jangka panjang sektor ini diharapkan dapat tumbuh lebih cepat lagi dan mampu menyerap kelebihan tenaga kerja dari sektor pertanian. Inovasi-inovasi teknologi di bidang industri sangat diharapkan untuk mendukung sektor ini, tidak saja untuk menjawab permintaan pasar domestik tetapi juga pasar internasional.

Sektor listrik, gas dan Air Bersih di Kabupaten Bantul tahun 2002, merupakan sektor yang kecil kontribusinya terhadap PDRB, pada tahun 2002 memberikan kontribusi sebesar 0,54 persen, lebih tinggi dari tahun sebelumnya, tahun 2001 sebesar 0,52 persen. Di Kabupaten Bantul hanya terdapat sektor listrik dan air bersih, listrik yang diproduksi meliputi listrik yang dijual, dipakai sendiri, hilang dari transmisi dan listrik yang dicuri. Sedangkan untuk sub sektor air bersih mencakup proses pembersihan, pemurnian dan proses kimiawi lainnya untuk menghasilkan air minum, serta pendistribusian dan penyaluran secara langsung melalui pipa dan alat lain ke rumah tangga, instansi pemerintah dan swasta.

Sektor bangunan di Kabupaten Bantul tahun 2002 memberikan kontribusi sebesar 9,92 persen, lebih rendah dari tahun sebelumnya tahun 2001 senilai 10,07 persen. Akan tetapi dalam jangka panjang sektor ini diprediksikan akan mengalami perkembangan yang lebih baik, mengingat Kabupaten Bantul merupakan daerah yang cocok bagi pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan jalan, pembangunan pertokoan, perumahan maupun perluasan kampus perguruan tinggi, banyak dibangun di daerah ini.

Sektor perdagangan, hotel dan restoran di Kabupaten Bantul tahun 2002 memberikan kontribusi senilai 17,24 persen, meningkat dari tahun sebelumnya 2001 senilai 16,90. Perkembangan subsektor perdagangan sangat dipengaruhi oleh aktivitas sektor-sektor lain, seperti sektor pertanian, penggalian dan industri. Semakin besar sektor-sektor ini menghasilkan produk, makin besar pula aktivitas sektor perdagangan. Sedangkan tingginya kontribusi subsektor restoran mungkin disebabkan oleh naiknya kecenderungan makan diluar terutama bagi para pekerja dan mahasiswa. Sedangkan untuk subsektor hotel peranannya masih relatif kecil, hal ini dikarenakan baik jumlah maupun kualitas hotel di Bantul masih belum memadai.

Kegiatan sektor pengangkutan dan komunikasi di Kabupaten Bantul tahun 2002, memberikan kontribusi sebesar 8,08 persen. Selama kurun waktu tiga tahun, kegiatan sektor ini cenderung menurun tahun 2000 senilai 8,28 persen, dan tahun 2001 turun senilai 8,16 persen. Di Kabupaten Bantul subsektor pengangkutan meliputi pemindahan penumpang dan barang dari satu tempat ke tempat lain, dengan menggunakan alat angkut, baik kendaraan

bermotor maupun bukan motor. Sedangkan jasa penunjang angkutan mencakup kegiatan yang sifatnya menunjang kegiatan pengangkutan, seperti terminal, parkir dan pergudangan. Sedangkan subsektor komunikasi terdiri dari pos/giro, mencakup pemberian jasa wesel, pengiriman surat dan paket pos. Jasa penunjang telekomunikasi meliputi telegram, telepon, termasuk wartel, pager dan ponsel. Kecenderungan menurunnya kontribusi sektor ini dikarenakan kecilnya pemasukan dari subsektor-subsektor tersebut, seperti diketahui sebagian besar penduduk Bantul adalah petani, buruh industri, yang tidak begitu menggunakan fasilitas dari sub-sub sektor diatas, walaupun ada hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan penduduk di Kabupaten Bantul.

Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan di Kabupaten Bantul tahun 2002 memberikan kontribusi senilai 6,72 persen cenderung mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan subsektor bank yang sangat tinggi yang disebabkan oleh membaiknya kinerja sektor bank, begitu juga dengan membaiknya pertumbuhan subsektor jasa perusahaan, seperti banyaknya jasa hukum, jasa bangunan, jasa periklanan, begitu juga pertumbuhan subsektor persewaan meningkat seperti sewa bangunan, persewaan mesin dan peralatan untuk keperluan pertanian.

Kegiatan sektor jasa-jasa di Kabupaten Bantul tahun 2002 memberikan kontribusi sebesar 19,84 persen, sektor ini cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun, meskipun begitu sektor ini merupakan penyumbang terbesar kedua bagi PDRB Kabupaten Bantul, penurunan ini meliputi

penurunan subsektor pemerintahan umum, yang diindikasikan oleh turunnya belanja pegawai, serta turunnya kegiatan jasa sosial kemasyarakatan, jasa hiburan dan rekreasi, sebagai akibat dari tragedi bom Bali pada bulan Oktober 2002, yang juga berdampak pada larangan perjalanan, dari beberapa negara Eropa dan Australia ke Indonesia.

Untuk melihat pergeseran struktural biasanya sektor-sektor perekonomian dikelompokkan menjadi sektor primer, sekunder dan tersier. Wilayah yang mempunyai perekonomian yang sudah maju biasanya ditandai dengan peranan sektor-sektor primer yang cukup kecil. Secara umum selama tiga tahun terakhir tidak terjadi pergeseran struktural yang berarti di Kabupaten Bantul, sampai dengan tahun 2002 sektor primer masih mempunyai share yang cukup besar sekitar 30 persen bagi pertumbuhan PDRB Kabupaten Bantul. Namun demikian kelompok sektor tersier tetap merupakan komponen besar dari PDRB Kabupaten Bantul.

#### **2.4.3. Keuangan Daerah**

Pelaksanaan pembangunan daerah selalu diusahakan agar senantiasa selaras dengan roda pembangunan nasional. Untuk itu diharapkan pemerintah daerah dapat mewujudkan otonomi daerah secara lebih merata. Kebutuhan dana untuk pembiayaan pembangunan yang makin meningkat membawa konsekuensi akan perlunya selektif memanfaatkan sumber dana yang ada dan menggali sumber-sumber dana baru secara terus menerus guna meningkatkan penerimaan daerah. Usaha pemerintah daerah dalam menggali sumber dana dari potensi daerah yang dimiliki serta kemampuan mengelola dan memanfaatkan sumber

dana yang tercermin pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Tabel 2.5  
Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Daerah  
Di Kabupaten Bantul tahun 2002  
(Rp.000)

Uraian	Tahun 2002
<b>PENERIMAAN</b>	<b>336.570.264</b>
1. Sisa Tahun lalu	15.725.800
2. PAD	22.425.147
3. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	12.944.617
4. Subsidi	0
5. Bantuan Pembangunan	0
6. Pinjaman Pemerintah Daerah	0
7. Bagian. Lain penerimaan yang sah	26.794.700
8. Pos Dana Alokasi Umum	258.680.000
<b>PENGELUARAN</b>	<b>337.089.605</b>
1. Pengeluaran Rutin	259.772.828
2. Pengeluaran Pembangunan	54.985.866
3. Sisa Perhitungan	22.330.911

Sumber: Bantul Dalam Angka, BPS, 2002

Tabel 2.5 menunjukkan jumlah Penerimaan Daerah Kabupaten Bantul tahun 2002, sejumlah Rp.336.570.264 dengan perincian Bagian sisa lebih tahun sejumlah Rp. 15.725.800; sedangkan Bagian hasil pajak dan bukan pajak jumlahnya Rp. 12.944.617; untuk Subsidi nilainya kosong, berarti pemerintah daerah tidak mendapatkan lagi subsidi karena dengan adanya otonomi daerah

maka subsidi dari pemerintah pusat ditiadakan. Begitu juga dengan dana Bantuan pembangunan tidak ada. Pinjaman pemerintah daerah juga kosong, untuk bagian lain penerimaan lain yang sah sejumlah Rp.26.794.700; untuk Pos Dana Alokasi Umum, sejumlah Rp.258.680.000

Sementara pengeluaran rutin sejumlah Rp.259.772.828, meliputi pengeluaran untuk Belanja pegawai, Belanja Barang, Biaya pemeliharaan, Belanja perjalanan, Belanja Lain-lain, Angsuran pinjaman dan Ganjaran Subsidi dan sumbangan kepada daerah bawahan. Sementara untuk Pengeluaran pembangunan sejumlah Rp. 54.985.866, meliputi Pengeluaran yang tidak termasuk Bagian lain dan Pengeluaran tidak terduga.

Dari data diatas menunjukkan bagian dari penerimaan keuangan daerah yang memberikan kontribusi terbesar pertama adalah pada Pos Dana Alokasi Umum senilai Rp. 258.680.000, kemudian terbesar kedua dalam memberikan kontribusi terhadap penerimaan keuangan daerah berasal dari Bagian lain penerimaan yang sah sejumlah Rp.26.794.700